

# Menjagal Sejarah (Daging) Sapi



**Heri Priyatmoko**  
Dosen Sejarah,  
Universitas Sanata Dharma  
Sejarawan Solo

**R**embang petang, Sabtu lalu, telepon genggam saya tergetar. Ada pesan masuk yang dikirim kawan jurnalis koran ini. Sewaktu menyimak isi pesan itu, kebetulan stasiun televisi menyiarkan hewan qurban yang akan disembelih hari Senin (12/9). Saya "ditodong" sekelumit pertanyaan perihal kampung Jagalan yang berjejal dengan kisah historis aktivitas pembehan rajakaya di Solo. Komentar ringkas serta pokok dibutuhkan untuk rubrik New Analysis (Minggu, 11/9). Almari dibuka, saya membolak-balik dokumen dan literatur sejarah kuliner.

Tulisan ini hendak menggenapi ulasan di rubrik tersebut sekaligus menjembarkan gugusan pengetahuan boga di kota bergelar "surga kuliner" ini. Senyampang masih bergayut pada julukan lainnya Solo sebagai "kota keplek ilat", sayang bila mengabaikan fenomena sejarah "perdagangan" yang memperkaya hasil olahan di pawon masyarakat Surakarta.

Menyantap daging yang dimangsak di dapur bukan sekadar persoalan mengenyangkan perut, tapi bertema dengan identitas sosial yang dikonstruksi di meja makan. Daging sapi ternyata juga menjadi bagian dari urusan negara. Maka, wajar jika dijumpai fakta berupa bangunan abattoir (tempat pemotongan hewan) atau omah njagal rajakaya di Surakarta yang pada gilirannya melahirkan toponimi kampung Jagalan.

Seekor sapi oleh masya-

rakat Jawa dimaknai sebagai tabungan dan sahabat mengelola sawah. Beda dengan barisan toewan Walanda di Hindia Belanda yang merawat budaya makan dari negeri asalnya, dimana daging sapi merupakan bahan utama suatu masakan. Kebiasaan ini dipengaruhi oleh ekologi sabana yang mendukung pengembangbiakan ternak sapi. Populasi sapi tak terbendung, dan akhirnya bukan lagi dianggap barang mewah. Sementara di telatah Jawa, sapi dieman-eman untuk dibelih. Jikapun dikonsumsi, hanya saat keperluan khusus saja, misalnya hajatan keluarga bupati dan bangsawan.

Pemerintah kolonial menyurat jumlah komunitas penggila daging sapi di

Ya, peninggalan pemerintah kolonial tak semuanya buruk, apalagi dengan kedisiplinan dan ketatnya mereka dalam perkara kesehatan dan kebersihan

afstuk (bistik), dan soep (sup) tidak boleh kendat.

Pertengahan abad XIX, bangunan abattoir masih sederhana. Sementara itu, masyarakat juga melakukan pemotongan sapi secara mandiri alias belum "recocki" pemerintah dengan segepok regulasi. Bahkan, mereka bebas menjual ke pasar kota meski tanpa jaminan kebersihan dan kesehatan ternak. Dari optik sejarah Fadly Rahman (2014) terpapar bahwa pemerintah menelurkan Staatsblad tahun 1849, no 52

jamin kebersihan tempat dan peralatan pejalanya, serta ternaknya memenuhi standar sehat dan layak potong. Untuk poin yang disebut terakhir, pejabat Belanda sangat memerhatikan mata rantai proses pemotongan ternak hingga dagingnya terjamin layak dan sehat untuk disantap konsumen.

Dalam regulasi terpacak kalimat: "Binatang njang di potong, baik antero atawa potong-potongannya tiada boleh di toetooop sama gemook, tetapi misti di diting-

nui unsur higienis. Para pekerja di abattoir membuang tulang belulang di timur Pasar Gedhe yang kala itu masih berupa tanah lapang yang kumuh. Hari bersalin hari, lokasi pembuangan balung itu dikenal dengan nama kampung "Balong", dan selanjutnya didirikan rumah bilik yang dihuni kaum buruh Tionghoa-Jawa.

Gaya hidup dan selera makan golongan Eropa rupanya diikuti kaum bangsawan dan priayi. Tak ayal, abattoir tak pernah senyap dari aktivitas pemotongan guna memenuhi kebutuhan lidah kelas atas itu. Melihat kahanan ini, pemerintah menggenjot pajak potong hewan (slachtbelasting). Dalam kerja mengais data, saya memperoleh arsip memori van overgave (laporan serah terima jabatan) Residen Surakarta van Wijk tahun 1914. Dokumen tersebut menyebut, kaum bumiputera di kerajaan ditunjuk sebagai petugas penarik pajak daging. Pajak dipotong 10 persen untuk upah sebelum disetorkan ke pegawai pemerintahan kolonial dan diteruskan ke algemene ontvanger (kasisir umum). Keluarga kelas atas dan restoran di Surakarta makin menggemari daging sapi, sampai-sampai tahun 1900 pajak sebesar f 144.854 mengalir ke kas negara. Satu dekade kemudian, 1910 mengalami kenaikan sebesar 149.700.

Saat orok Indonesia lahir, urusan daging sapi dan tempat pembehan itu dikelola Dinas Peternakan, namun masih berstatus Jawatan Veterinair Hygiene yang dipimpin oleh dokter hewan KRT Tjondronegoro. Pemerintah Indonesia sampai hari ini mewarisi model kerja petinggi kolonial, juga bersedia melototi daging sapi yang beredar di pasaran demi memastikan kondisi daging aman untuk dimasak.

Ya, peninggalan pemerintah kolonial tak semuanya buruk, apalagi dengan kedisiplinan dan ketatnya mereka dalam perkara kesehatan dan kebersihan. Apabila di pasar marak daging glonggongan dan sapi mati sebelum disembelih, bisa jadi itulah cermin manusia Indonesia...



Surakarta tahun 1900 ada 1.937 jiwa, dan tahun 1912 bertambah menjadi 2.000 jiwa. Yang pasti, mereka telah bercokol di kota tua ini sejak Benteng Vastenburg didirikan tahun 1745. Konsumen utama daging sapi ini tinggal di dalam Benteng Vastenburg, Loji Wetan, Jebres, Villapark, Ngemingan, Sekarpace, Petoran, dan Ngebrusan. Mereka berkantong tebal, buntutnya urusan makan menjadi gaya hidup. Mau tak mau, pasokan daging sapi untuk santapan akrab toewan mener seperti smoor (semur), steak, be-

(Letter A) lantaran memerogoki makin meningkatnya penyembelihan sapi dan kerbau serta penjualan dagingnya di pasaran. Aturan tersebut berisi 18 pasal perihal pemotongan sapi dan kerbau yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Melayu Pasar.

Sejumlah syarat dijereang: pemotongan sapi dan kerbau harus mengantongi izin aparat pemerintah bagian pejalanya. Disertakan pula alasan penyembelihan, contohnya untuk upacara selamatan dan hajatan lainnya. Bagi yang melanggar akan didenda. Juga ter-

galkan bagaimana adanja, dan lagi tiada boleh potong binatang njang sakit, atawa djoewal dagingnja binatang njang mati...". Alasan pemerintah mengeluarkan itu tampaknya berdasarkan temuan di lapangan, seperti hewan yang dicincang secara tidak layak serta daging kotor dan berlemak yang beredar di pasar.

Paku Buwana X bermodal setumpuk uang berkolaborasi dengan pemerintah kolonial mempercantik abattoir. Diatur pula tempat pembuangan balung tidak boleh di komplek penyembelihan demi mem-